



## **Kristologi Kenosis sebagai Paradigma Etika Kebangsaan: Kritik Teologis terhadap Oligarki dan Korupsi Politik di Indonesia**

**Obet Nego<sup>1</sup>, Samuel Manaransyah<sup>2</sup>, Timothy Alva Fiderio Polin<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer <sup>1,2</sup>, Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu<sup>3</sup>  
Obetnego0807@gmail.com<sup>1</sup>, samuelmanaransyah03@gmail.com<sup>2</sup>, [alvpo031@gmail.com](mailto:alvpo031@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*This article examines the relevance of Kenotic Christology as a theological foundation for national ethics in addressing oligarchy and political corruption in Indonesia. The dominance of oligarchic power, kleptocracy, and dynastic politics has weakened the moral legitimacy of democracy and revealed a crisis of ethical leadership. Based on Philippians 2:5-11, Kenosis offers an ethical paradigm that emphasizes humility, self-emptying, and service as the foundation of public leadership. This study employs a qualitative library research method, focusing on the theological interpretation of Philippians 2:5-11 and the works of theologians such as Moltmann and Kitamori, analyzed through theological hermeneutics and conceptual-philosophical analysis. The findings highlight three key kenotic values, anti-greed as a critique of corruption, sacrificial service as an ethical alternative to oligarchy, and national solidarity as a corrective to social inequality. Thus, Kenosis serves as an ethical antithesis to the abuse of power and provides a moral framework for political reform grounded in justice and integrity.*

*Keywords: Christological Kenosis; National Ethics; Oligarchy; Political Corruption.*

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji relevansi Kristologi Kenosis sebagai dasar etika kebangsaan dalam menghadapi oligarki dan korupsi politik di Indonesia. Dominasi oligarki, kleptokrasi, dan politik dinasti telah melemahkan legitimasi moral demokrasi dan menandakan krisis etika kepemimpinan. Berdasarkan Filipi 2:5-11, Kenosis menawarkan paradigma etis yang menekankan kerendahan hati, pengosongan diri, dan pelayanan sebagai dasar kepemimpinan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka, berfokus pada penafsiran teologis terhadap Filipi 2:5-11 serta karya teolog seperti Moltmann dan Kitamori melalui hermeneutika teologis dan analisis konseptual-filosofis. Hasil kajian menunjukkan tiga nilai kenotik utama, yaitu anti-keserakahan sebagai kritik korupsi, pelayanan berkorban sebagai alternatif melawan oligarki, dan solidaritas kebangsaan sebagai koreksi ketimpangan sosial. Dengan demikian, Kenosis menjadi antitesis etis terhadap penyalahgunaan kuasa sekaligus kerangka moral bagi reformasi politik yang adil dan berintegritas.

Kata kunci: Kristologi Kenosis; Etika Kebangsaan; Oligarki; Korupsi Politik.

### **Pendahuluan**

Indonesia menghadapi realitas politik yang ditandai oleh fenomena kronis oligarki kekuasaan, korupsi politik, dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang semakin menguat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa oligarki telah membentuk sistem patronase politik yang berimplikasi pada melemahnya meritokrasi dan supremasi hukum (Gunanto, 2020; Suteki, 2022). Korupsi politik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh individu tertentu, melainkan terstruktur secara sistemik dalam partai politik dan pemerintahan (Elyta et al., 2022; Irham, 2021). Dinasti politik dan politik uang memperkuat sirkulasi elite yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi merugikan kepentingan publik (Purwaningsih & Widodo, 2020; Ranggong et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya krisis etika yang

serius dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Persoalan etika kepemimpinan telah diidentifikasi sebagai akar dari perilaku koruptif dan penyalahgunaan kekuasaan (Marwing, 2021; Mugiyanto, 2022). Dalam konteks ini, teologi Kristen menawarkan perspektif moral yang berpotensi membongkar akar masalah tersebut. Salah satu prinsip teologis yang relevan adalah Kenosis, yakni pengosongan diri Kristus yang menekankan kerendahan hati dan pelayanan.

Krisis etika dalam kepemimpinan terlihat jelas dari pola kleptokrasi politik yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik (Marwing, 2021). Studi tentang illicit enrichment menegaskan bahwa perilaku memperkaya diri secara tidak sah merupakan indikator kuat lemahnya etika publik dalam birokrasi (Muzaki, 2021). Ketidakadilan hukum dan ketimpangan sosial yang dihasilkan dari korupsi dan oligarki turut memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Yuflih, 2022). Sistem politik yang didominasi oleh kapitalisasi kekuasaan menggantikan legitimasi moral dengan legitimasi kapital (Musa, 2022). Kondisi ini membuat nilai-nilai dasar Pancasila dan demokrasi sulit terwujud secara substantif. Dalam praktiknya, supremasi hukum kerap runtuh karena intervensi oligarki dan kompromi elite (Suteki, 2022). Situasi tersebut mencerminkan krisis kebangsaan yang mendalam, yang tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma etika baru yang menembus dimensi spiritual, moral, dan politik sekaligus.

Kenosis, sebagaimana dijelaskan dalam Filipi 2:5-11, menggambarkan kerendahan hati Kristus yang mengosongkan diri demi melayani dan menyelamatkan manusia. Teolog seperti Jersak (2023), Patricia dan Baholy (2023) menekankan bahwa Kenosis bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan moral yang membongkar dominasi egoisme dan kuasa. Ryliškytė (2024) menambahkan bahwa solidaritas kenotik dapat menjadi pola hidup yang menolak dominasi kekuasaan demi kebersamaan. Brodsky menunjukkan bahwa interpretasi moral Kenosis dapat dipahami sebagai kritik filosofis terhadap praktik keserakahan dan penyalahgunaan otoritas. Dalam konteks etika kebangsaan, Kenosis dapat dipahami sebagai prinsip yang menolak oligarki dan korupsi dengan mengedepankan pengosongan diri demi kepentingan bangsa (Brodsky, 2024). Kenosis mengajarkan pentingnya kerendahan hati dalam pelayanan publik dan pengelolaan kekuasaan. Nilai ini menentang paradigma politik yang berorientasi pada diri sendiri atau kelompok terbatas (Walui & Novalina, 2024). Dengan demikian, Kristologi Kenosis dapat dijadikan fondasi untuk membangun etika kebangsaan yang lebih berintegritas.

Oligarki politik di Indonesia menunjukkan konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite yang memanipulasi sistem hukum dan politik untuk kepentingan pribadi (Tambunan, 2023). Politik dinasti memperlihatkan bagaimana jabatan publik diwariskan sebagai privilege, bukan diperoleh melalui meritokrasi (Purwaningsih & Widodo, 2020). Kenosis menawarkan kritik terhadap model kepemimpinan ini, karena menolak keserakahan dan mengajarkan kerendahan hati sebagai dasar etika publik. Prinsip Kenosis menuntut pejabat publik untuk mengosongkan diri dari ambisi pribadi dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Dalam perspektif teologis, Kenosis dapat dipahami sebagai bentuk spiritualitas politik yang menolak dominasi oligarki. Konsep ini berimplikasi pada etika kebangsaan yang menekankan pelayanan, keadilan, dan keberpihakan pada yang lemah (Daryanto, 2022). Dengan demikian, Kenosis berfungsi sebagai kritik sekaligus alternatif etis terhadap mentalitas koruptif yang mengakar dalam budaya politik Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi reformasi moral yang berbasis pada Kristologi.

Meskipun terdapat banyak kajian tentang Kenosis dalam ranah spiritualitas pribadi dan etika komunitas, eksplorasi sistematis mengenai penerapannya dalam etika kebangsaan masih sangat minim. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai Kenosis berfokus pada dimensi spiritual dan etika pelayanan gereja. Kajian seperti yang dilakukan oleh Josette dan Baholy (2023) serta Ryliškytė (2024) menafsirkan Kenosis terutama sebagai pola kehidupan rohani yang menekankan kerendahan hati, pengorbanan, dan pelayanan dalam konteks

komunitas iman. Pendekatan ini penting, tetapi cenderung menempatkan Kenosis dalam ranah moral personal atau eklesiologis, bukan dalam analisis struktur sosial-politik. Sementara itu, penelitian yang membahas isu-isu politik di Indonesia, seperti oligarki, politik dinasti, dan kleptokrasi, lebih banyak berasal dari bidang ilmu politik dan hukum, dengan penjelasan struktural dan sosiologis (Budi, 2024; Damanik et al., 2025; Layyina et al., 2024; Pahlevi, 2022). Kajian tersebut jarang mengaitkan problem kekuasaan dengan refleksi teologis, terutama dari perspektif Kristologi Kenosis.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini secara khusus mengintegrasikan teologi Kristologis dengan analisis etika kebangsaan. Penelitian ini menempatkan Kenosis bukan sekadar sebagai teladan moral individu, tetapi sebagai paradigma teologis dan filosofis yang dapat membongkar akar etis dari oligarki dan korupsi politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam dua hal, yaitu pertama, memperluas cakupan kajian Kenosis ke ranah etika politik dan kebangsaan; kedua, menghadirkan model Etika Kebangsaan berbasis Kenosis sebagai kerangka moral untuk reformasi sosial-politik di Indonesia. Dengan kontribusi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kerangka etika alternatif yang bersumber dari teologi bagi diskursus politik nasional. Penelitian ini juga menekankan urgensi pemikiran teologis kontekstual dalam mengatasi krisis moral bangsa. Batasan penelitian terletak pada sifat konseptual-teologis tanpa melakukan survei empiris. Namun, analisis konseptual ini tetap relevan karena dapat memperluas horizon pemikiran etis dalam menghadapi persoalan politik kontemporer. Dengan landasan tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teologi politik yang kontekstual, relevan, dan aplikatif untuk menjawab persoalan bangsa Indonesia. Dari latar tersebut, muncul pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini, "Bagaimana Kristologi Kenosis dapat menjadi paradigma etika kebangsaan yang melawan oligarki dan korupsi politik di Indonesia?"

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang dipadukan dengan hermeneutika teologis serta analisis konseptual-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat kajian yang bersifat normatif dan reflektif, menuntut penelusuran makna teologis secara mendalam untuk menemukan relevansi etis dari Kristologi Kenosis terhadap persoalan politik Indonesia. Sumber data primer mencakup teks-teks Alkitab, khususnya Filipi 2:5–11 (Uling & Candrawati, 2025), serta karya-karya teolog seperti Jürgen Moltmann dan Kazoh Kitamori (Bertova, 2024; Mostert, 2013), sedangkan data sekunder terdiri atas literatur mengenai politik Indonesia, oligarki, korupsi, demokrasi, dan teologi kontekstual. Kerangka hermeneutik yang digunakan adalah hermeneutika kontekstual sebagaimana dikembangkan oleh Bevans (2022), yang menekankan dialog antara teks, konteks, dan tradisi iman, serta dipadukan dengan perspektif Moltmannian yang membaca teks Kristologis sebagai panggilan etis untuk transformasi sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, pembacaan intensif, pencatatan, dan pengelompokan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu deskripsi (mendeskripsikan konsep Kenosis serta realitas oligarki dan korupsi), koneksi (menghubungkan prinsip-prinsip Kenosis seperti kerendahan hati, pengorbanan diri, dan pelayanan dengan kebutuhan etika kebangsaan), dan interpretasi kritis (menganalisis bagaimana Kenosis dapat menjadi antitesis terhadap keserakahan, penumpukan kekuasaan, dan praktik koruptif). Dengan pendekatan hermeneutika teologis dan konseptual-filosofis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam tentang peran Kristologi Kenosis sebagai dasar etika kebangsaan dalam menghadapi tantangan oligarki dan korupsi politik di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Oligarki dan Korupsi Politik di Indonesia***

Fenomena oligarki di Indonesia telah menjadi salah satu ciri utama dari dinamika politik kontemporer. Oligarki ditandai dengan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada segelintir elite yang menguasai akses politik, ekonomi, dan kebijakan publik. Sentralisasi kekuasaan ini memunculkan pola patronase, praktik rent-seeking, serta dominasi jaringan keluarga politik (Gunanto, 2020; Mukti & Rodiyah, 2020). Menurut Marwing (2021), fenomena oligarki bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk kleptokrasi politik karena hubungan erat antara penguasa dan praktik penyalahgunaan sumber daya negara. Oligarki juga memperlemah demokrasi, membatasi hak asasi manusia, serta memperbesar ketimpangan ekonomi (Ismayani et al., 2022). Konsolidasi elite dalam bentuk politik dinasti atau penguasaan sumber daya politik secara eksklusif menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasi demokrasi di Indonesia. Novianto dan Wulansari (2023) menunjukkan bagaimana gerakan masyarakat sipil kerap muncul sebagai perlawanan terhadap penetrasi oligarki dalam pemilu lokal. Realitas ini menggambarkan bahwa oligarki bukan hanya persoalan struktural, melainkan juga etis dan moral.

Korupsi politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan oligarki yang menguasai sistem politik. Korupsi pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan publik. Elyta, Hertanto, dan Maryanah (2022) menegaskan bahwa “korupsi elit partai politik di era reformasi justru semakin mengakar sebagai praktik normal yang sulit diberantas.” Alfa dan Fahmi (2022) juga menyoroti maraknya pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang menunjukkan keterhubungan erat antara perebutan kekuasaan dan perilaku koruptif. Penelitian Faiki (2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar tindak pidana, tetapi juga fenomena sosial yang merusak moralitas bangsa. Bahkan, Irham (2021) menilai eksklusivitas partai politik telah mempercepat pertumbuhan korupsi dalam demokrasi Indonesia. Karena itu, korupsi politik telah menjadi gejala sistemik yang terkait langsung dengan struktur oligarkis. Praktik ini semakin menegaskan perlunya kritik teologis dan etis yang mampu menantang akar masalah.

Keterkaitan antara oligarki dan korupsi politik semakin jelas ketika meninjau berbagai penelitian yang menyoroti dampaknya terhadap demokrasi, hukum, dan masyarakat sipil. Mugiyanto (2022) menjelaskan bagaimana oligarki kekuasaan berhubungan erat dengan politik hukum penguasa, sehingga supremasi hukum kerap tereduksi oleh kepentingan elite. Bidandi, Williams, dan Waiswa (2022) bahkan menyamakan praktik oligarki di Indonesia dengan predatory governance yang juga terjadi di Uganda. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan serta adanya penyalahgunaan kekuasaan selama masa pandemi Covid-19, sebagaimana ditunjukkan oleh Hayckel dan Chairiyah (2022). Sofhian (2021) menggambarkan penanganan korupsi di Indonesia sebagai sebuah jalan panjang yang sarat dengan hambatan struktural. Dalam konteks ini, hukum seringkali tidak berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat legitimasi bagi kelompok yang berkuasa. Seperti ditegaskan Suteki (2022), hegemoni oligarki menyebabkan “ambruknya supremasi hukum” di Indonesia. Situasi ini memperlihatkan bahwa oligarki dan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi krisis etika politik.

Akar teologis-etis dari oligarki dan korupsi dapat ditelusuri pada sifat dasar manusia yang cenderung egois, rakus, dan mengejar absolutisme kekuasaan. Dalam bahasa teologis, sifat keserakahan ini sering disebut sebagai pleonexia, yaitu keserakahan yang melampaui

kebutuhan, yang pada akhirnya merusak tatanan keadilan dan solidaritas sosial (Gule, 2022; Vergara, 2021). Daryanto menekankan bahwa lawan dari mentalitas ini adalah sikap kenosis, yaitu pengosongan diri dan keberpihakan kepada orang miskin. Sifat oligarki yang mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan bertentangan langsung dengan nilai pengorbanan diri dan pelayanan dalam Kristologi Kenosis (Daryanto, 2022). Fenomena politik dinasti dan dominasi oligarki memperlihatkan bahwa nafsu mempertahankan kekuasaan tanpa batas telah menyingkirkan prinsip keadilan (Hasanal Bolqiah & Raffiudin, 2020; Purwaningsih & Widodo, 2020). Ketika politik dijalankan hanya untuk melestarikan kepentingan elite, maka etika publik kehilangan substansinya. Dari perspektif teologi politik, hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari panggilan manusia untuk hidup dalam relasi yang adil dan saling melayani. Oleh karena itu, analisis etis-teologis menjadi penting untuk membongkar dimensi moral di balik oligarki dan korupsi.

Dari perspektif teologi politik, oligarki dan korupsi bukan hanya masalah moral individu, tetapi merupakan bentuk konkret dari struktur dosa (*structural sin*) yang beroperasi dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Struktur dosa ini muncul ketika egoisme manusia dilembagakan menjadi mekanisme kekuasaan yang menindas dan melanggar ketidakadilan (Salahudin et al., 2025). Dalam kerangka teologi pembebasan, hal ini dapat dipahami sebagai kejahatan sosial (*social evil*), yakni dosa yang terwujud dalam struktur yang menindas martabat manusia dan merusak relasi sosial (Meyer et al., 2025). Ketika politik dijalankan hanya untuk melestarikan kepentingan elite, etika publik kehilangan substansinya dan masyarakat terjebak dalam perbudakan struktural yang melawan kehendak Allah (Valsangiacomo, 2024; Vergara, 2020). Oleh karena itu, analisis etis-teologis menjadi penting untuk membongkar dimensi moral di balik oligarki dan korupsi, serta menegaskan kembali panggilan manusia untuk hidup dalam relasi yang adil, melayani, dan membebaskan sesama sebagaimana diteladankan oleh Kristus melalui kenosis-Nya.

Berbagai upaya penanggulangan korupsi di Indonesia memang telah dilakukan, mulai dari reformasi hukum, penerapan pembuktian terbalik, hingga kampanye budaya antikorupsi. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena persoalan struktural dan kultural yang mendalam (Arifin et al., 2023; Hasan, 2020). Maraknya praktik politik uang dan lemahnya penegakan hukum memperlihatkan bahwa problem ini lebih dari sekadar isu teknis, melainkan krisis moral yang mengakar (Ranggong et al., 2023). Oleh sebab itu, persoalan oligarki dan korupsi politik tidak dapat hanya diselesaikan melalui instrumen hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan etis dan spiritual. Maboloc menyoroti bagaimana perlawanan terhadap oligarki menuntut adanya argumen moral yang lebih kuat dibanding sekadar regulasi politik. Dalam kerangka inilah teologi, khususnya Kristologi Kenosis, dapat memberikan tawaran etis yang radikal (Maboloc, 2020). Dengan menekankan kerendahan hati, pengosongan diri, dan keberpihakan pada kepentingan publik, Kenosis menawarkan sebuah antitesis terhadap egoisme politik yang mendasari oligarki dan korupsi.

### ***Kristologi Kenosis***

Konsep kenosis berakar dari Filipi 2:5-11, di mana Paulus menggunakan kata Yunani κένωσις (*kenōsis*) yang berarti "pengosongan diri." Istilah ini berasal dari verba κενώω

(kenoō) yang berarti “mengosongkan” atau “membuat hampa” (Ottuh, 2020). Paulus menegaskan bahwa Kristus “ἐκένωσεν ἑαυτὸν” (ekenōsen heauton), yakni mengosongkan diri-Nya dengan mengambil rupa hamba (Le Poidevin, 2013). Dalam kerangka historis-teologis, kenosis dipahami sebagai tindakan sukarela Yesus menanggalkan hak istimewa keilahian untuk mengambil rupa seorang hamba (Josette & Baholy, 2023). Feinberg (1980) menyebutkan, “It is first found in Patristic literature, and is used thereafter almost as a synonym for incarnation. The central concern is with the nature of Christ’s condescension and humiliation while he was in the flesh.” Selanjutnya, Jersak (2023) menegaskan bahwa kenosis merupakan “fondasi biblis bagi pemahaman Kristologi yang menekankan pengorbanan sukarela sebagai inti kemanusiaan Kristus”. Menurut Magree (2024), penafsiran ini telah menjadi titik tolak bagi diskusi teologis lintas zaman, mulai dari gereja purba hingga pemikiran modern. Kenosis tidak dipahami sebagai kehilangan hakikat ilahi, melainkan sebagai penundukan diri dalam ketaatan penuh kepada Bapa (Jones-Carmack, 2020). Dimensi historisnya menunjukkan bahwa gereja mula-mula menafsirkan teks ini sebagai teladan kerendahan hati dan pelayanan. Dalam perkembangan teologi modern, kenosis diposisikan sebagai kritik terhadap model kekuasaan yang menindas (Jersak, 2023). Dengan demikian, definisi dasar kenosis menjadi fondasi etis bagi pemikiran Kristen dalam menghadapi persoalan politik kontemporer.

Prinsip-prinsip kenosis mencakup tiga aspek utama, yaitu kerelaan mengosongkan hak istimewa, mentalitas hamba, dan solidaritas dengan sesama. Ryliškytė (2024) menjelaskan bahwa “solidaritas kenotik mengajak umat Kristen untuk berpartisipasi dalam penderitaan orang lain sebagai bagian dari discernment iman”. Artinya, kenosis bukan hanya ajaran abstrak, melainkan praksis yang menuntut peneladanan nyata dalam kehidupan sosial dan politik. Kerelaan Kristus untuk tidak menggunakan hak-hak keilahian-Nya menjadi dasar etika publik yang menolak privilege berlebihan. Mentalitas hamba (servanthood) menekankan pelayanan sebagai bentuk kepemimpinan, yang berbeda dari pola dominasi. Solidaritas kenotik memanggil gereja untuk berpihak pada kelompok marginal sebagai ekspresi kasih Kristus (Adon et al., 2024a). Dengan prinsip-prinsip ini, kenosis menjadi paradigma kritis terhadap sistem sosial yang sarat ketidakadilan. Paradigma tersebut relevan untuk konteks bangsa Indonesia yang menghadapi krisis moral akibat oligarki dan korupsi.

Namun, pemahaman kenosis tidak dapat berhenti pada tataran moral atau etika pribadi. Dalam tradisi teologi kontemporer, para teolog menafsirkan kenosis bukan sekadar tindakan etis manusia meniru Kristus, melainkan tindakan ilahi yang membuka ruang bagi keberadaan yang lain. Moltmann menegaskan bahwa dalam kenosis, Allah tidak kehilangan keilahian-Nya, tetapi menunjukkan kasih-Nya dengan “mengosongkan diri ke dalam dunia” sebagai wujud solidaritas dengan ciptaan yang menderita (Kleeck Jr., 2021). Kazoh Kitamori mengartikan kenosis sebagai “rasa sakit Allah,” yang menggambarkan penderitaan kasih ilahi yang memaafkan dunia. Konsep ini menekankan bahwa Allah mengalami penderitaan secara nyata sebagai bagian dari kasih-Nya yang mendalam dan penebusan bagi ciptaan (Phillips, 2025). Rahner melihat kenosis sebagai bentuk self-communication of God, yaitu memahami kenosis sebagai bentuk komunikasi diri dengan Tuhan, di mana Allah secara aktif berpartisipasi dalam sejarah manusia dengan cara yang memungkinkan keterbukaan dan dialog antara ilahi dan dunia. Rahner menekankan bahwa kenosis bukan sekedar pengosongan diri secara pasif, melainkan tindakan komunikasi diri Allah yang

memungkinkan kehadiran dan karya Allah di dunia tanpa kehilangan keilahian-Nya (Agolia, 2020). Beberapa perspektif ini memperluas makna kenosis dari sekadar teladan moral menuju paradigma ontologis yang mengubah struktur relasi manusia dan tatanan sosial-politik.

Dasar biblika kenosis dapat ditemukan dalam Markus 10:45, di mana Yesus berkata, "Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Ayat ini menjadi pilar etika kepemimpinan publik yang menekankan pelayanan, bukan dominasi. Arifianto (2023) menafsirkan teks ini sebagai deskripsi kepemimpinan Kristen yang berpola kerendahan hati dan pengorbanan diri. Prinsip ini bertolak belakang dengan praktik politik yang sering kali dipenuhi orientasi kuasa dan keuntungan pribadi. Lebih jauh, Surbakti (2022) menegaskan bahwa Yesus sebagai Imanuel adalah pembebas yang berpihak kepada kaum lemah dan tertindas. Oleh karena itu, Markus 10:45 menghadirkan landasan bagi kritik terhadap kepemimpinan oligarkis di Indonesia. Dalam konteks ini, kenosis memaksa pemimpin untuk merefleksikan motivasi mereka, yaitu melayani kepentingan publik atau melanggengkan kepentingan elit. Ayat ini menjadi kunci dalam membangun etika publik yang bersumber dari Kristus.

Selain itu, Matius 20:25-28 menunjukkan kontras tajam antara model kepemimpinan duniawi yang tiranik dengan kepemimpinan Yesus yang melayani. Panjaitan (2020) menekankan bahwa kepemimpinan Yesus adalah model dasar kepemimpinan Kristen yang menolak pola tirani dan oligarki. Dalam teks ini, Yesus menegur murid-murid-Nya agar tidak meniru gaya kepemimpinan bangsa-bangsa yang "memerintah dengan tangan besi." Sebaliknya, kepemimpinan sejati adalah melayani, bahkan rela berkorban. Rahadian & Fallderama (2020) menambahkan bahwa tradisi Calvinis juga memiliki sikap kritis terhadap kekuasaan yang otoriter, sehingga kenosis sejalan dengan misi gereja dalam mengoreksi praktik politik. Relevansinya di Indonesia tampak dalam fenomena politik kleptokratik dan oligarki yang dijelaskan Marwing (2021). Melalui teks Matius ini, kenosis hadir sebagai koreksi teologis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Kristologi kenosis menegaskan bahwa pelayanan adalah inti dari etika kebangsaan.

Dalam konteks kontemporer, kenosis menjadi antitesis terhadap keserakahan, penumpukan kekuasaan, dan praktik koruptif. Mdingi (2020) menyebut kenosis sebagai "model kepemimpinan yang menolak monopoli kekuasaan demi memberi ruang bagi pelayanan dan keadilan sosial". Penelitian lain, seperti Tumbol dan Sukri, menunjukkan bagaimana etika Kristen dapat menjadi benteng moral dalam menghadapi korupsi yang merajalela. Konsep kenosis mendorong gereja untuk berani menyuarakan kebenaran sekaligus mempraktikkan solidaritas dengan rakyat kecil (Tumbol & Sukri, 2022). Speckman (2022) bahkan mengaitkan konsep Perjanjian Baru tentang korupsi dengan kehancuran kota dan ladang, menunjukkan dampak destruktif praktik tersebut terhadap kehidupan bersama. Oleh karena itu, kenosis relevan tidak hanya secara spiritual, tetapi juga secara politis. Kenosis mengingatkan bangsa bahwa etika pelayanan harus mengalahkan etika dominasi. Dengan landasan biblis dan teologis ini, Kristologi kenosis dapat diposisikan sebagai etika kebangsaan yang membangun masyarakat lebih adil dan berintegritas.

### ***Etika Kebangsaan Berbasis Kenosis***

Formulasi etika kebangsaan berbasis kenosis menegaskan bahwa prinsip κένωσις (kenosis) yang berarti pengosongan diri sebagaimana termaktub dalam Filipi 2:5-11

menjadi dasar spiritual melawan budaya politik koruptif di Indonesia. Nilai kenotik pertama, yaitu anti-keserakahan, berfungsi sebagai antitesis terhadap praktik korupsi yang merusak keadilan sosial. Rea (2022) menegaskan bahwa korupsi adalah “absennya keadilan dan cinta”, sehingga melawan korupsi sama artinya dengan menghidupi kasih yang otentik. Studi dari Iqbal Damanik et al. (2025) menunjukkan bahwa oligarki dan korupsi saling memperkuat, sehingga demokrasi seringkali hanya menjadi formalitas tanpa makna substantif. Kemudian penelitian Tsalitsa Haura Layyina et al., mempertegas bahwa oligarki di Indonesia tercermin dari dominasi segelintir elite politisi, pebisnis, dan militer yang menguasai politik dan ekonomi untuk melanggengkan kepentingan mereka. Melalui biaya politik tinggi dan kedekatan politik bisnis, lahir politico-capitalists yang memperkuat korupsi, konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Layyina et al., 2024). Oleh karena itu, kenosis mendorong kontrol diri terhadap nafsu materi, sehingga para pemimpin mampu menjalankan jabatan sebagai pelayanan publik, bukan sarana memperkaya diri. Hadiyanto (2022) bahkan menunjukkan bahwa regulasi hukum formal seringkali gagal menekan tindak pidana korupsi karena lemahnya internalisasi nilai etis. Oleh karena itu, kenosis menjadi fondasi etis yang melawan keserakahan struktural maupun personal. Melalui dimensi ini, etika kebangsaan berfungsi mengembalikan politik sebagai sarana pengabdian, bukan akumulasi kekuasaan.

Nilai kenotik kedua, yaitu pelayanan berkorban, memberi arah baru dalam melawan oligarki politik yang bercokol di Indonesia. Prinsip “menjadi hamba” sebagaimana diteladankan Kristus menunjukkan model kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Nggebu (2022) menekankan bahwa iman Kristen mendorong tindakan nyata dalam pencegahan korupsi melalui keteladanan moral dan pelayanan publik yang tulus. Dalam konteks Indonesia, oligarki seringkali menciptakan dinasti politik yang menggerus demokrasi (Purwaningsih & Widodo, 2020). Oleh sebab itu, pelayanan berkorban menolak dominasi kelompok kecil atas kepentingan rakyat banyak. Kritsak (2022) menyebut bahwa paradigma nilai spiritual dapat menjadi landasan kriminologi anti-korupsi yang efektif. Dengan demikian, etika kenosis menempatkan pemimpin sebagai pelayan yang berkorban, bukan penguasa yang mengeksploitasi. Suprihanto, Utama, dan Cahyaningtyas (2023) menegaskan bahwa reformulasi pemberantasan korupsi harus melibatkan perspektif pelayanan publik agar efektif. Dengan model ini, kenosis berperan langsung sebagai kritik etis terhadap oligarki yang merusak demokrasi.

Nilai kenotik ketiga adalah solidaritas kebangsaan, yang menuntut keberpihakan pada kaum marginal sebagai bentuk kerelaan menanggung penderitaan bersama. Konsep ini selaras dengan pandangan Daryanto (2022) yang menyatakan bahwa “keberpihakan terhadap orang miskin adalah tindakan kenosis”. Solidaritas kenotik memulihkan nilai keadilan sosial yang sering diabaikan dalam sistem politik yang bias terhadap elit. Ryliškyté menyebut solidaritas kenotik sebagai “kearifan spiritual yang melampaui individualisme politik.” Dengan demikian, kenosis bukan hanya kritik moral terhadap keserakahan, melainkan juga dorongan praktis untuk membangun bangsa berdasarkan semangat kebersamaan (Ryliškyté, 2024). Dalam konteks oligarki, rakyat kecil seringkali dimarjinalkan demi kepentingan segelintir elit. Etika kenosis justru menuntut keberpihakan pada mereka yang terpinggirkan agar politik kembali pada tujuan asalnya: kesejahteraan umum. Konsep ini juga mendorong kebijakan yang berfokus pada pengentasan ketimpangan sosial-ekonomi sebagai bentuk nyata pelayanan kebangsaan. Dengan demikian, solidaritas

kenotik memperluas ruang politik sebagai arena inklusif, bukan eksklusif.

Selain tiga nilai kenotik utama, referensi lain memperkuat relevansi kenosis dalam konteks kebangsaan Indonesia. Molina menyoroti pemikiran Hegel tentang kenosis yang dapat dipahami sebagai basis kritik terhadap absolutisme kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa teologi kenosis mampu berdialog dengan filsafat politik dalam membongkar praktik penyalahgunaan kuasa (Molina, 2025). Sementara itu, Lee, Meyer-Sahling, dan Park (2022) menunjukkan bahwa reformasi antikorupsi memerlukan perubahan psikologis dalam organisasi publik, bukan sekadar regulasi formal. Dengan demikian, kenosis memberikan motivasi spiritual untuk menata ulang struktur politik Indonesia. Weißmüller dan Zuber (2023) juga menekankan perlunya memahami fondasi mikro korupsi administratif, yang seringkali terkait dengan budaya birokrasi. Melalui pengosongan diri, individu dalam birokrasi dipanggil untuk mengedepankan etos pelayanan, bukan keuntungan pribadi. Kontribusi ini memperlihatkan bahwa kenosis memiliki daya transformasi baik pada level individu maupun sistem. Dengan kata lain, kenosis bukan hanya konsep teologis, tetapi juga metodologi etis untuk membangun tata kelola negara.

Akhirnya, formulasi etika kebangsaan berbasis kenosis harus dipandang sebagai strategi transformatif untuk membangun bangsa yang bebas dari oligarki dan korupsi. Isroani (2022) menilai bahwa degradasi nilai etika Pancasila mempercepat suburnya praktik korupsi, sehingga spiritualitas kenosis dapat memperbarui kembali komitmen moral bangsa. Bashir dan Hassan (2020) menegaskan bahwa “kepemimpinan yang beretika adalah syarat mutlak untuk pemberantasan korupsi”. Dalam perspektif ini, kenosis memberi orientasi baru dalam pendidikan politik, birokrasi, dan kepemimpinan publik di Indonesia. Etika kebangsaan yang berbasis kenosis menolak keserakahan, menumbuhkan semangat pelayanan, dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan mengintegrasikan teologi kenosis dengan politik praktis, Indonesia dapat membangun budaya politik yang berkeadilan. Neo, Grimmelikhuijsen, dan Tummers (2023) menambahkan bahwa nilai inti pegawai negeri sipil yang ideal adalah berorientasi pelayanan, responsif, dan berdedikasi, yang sejalan dengan semangat kenosis. Dengan demikian, kristologi kenosis membuka horizon baru bagi etika kebangsaan yang kontekstual, aplikatif, dan transformatif.

### **Implikasi**

Implikasi teoritis dari kajian Kristologi Kenosis menunjukkan bahwa konsep pengosongan diri Kristus (Filipi 2:5–11) dapat dijadikan paradigma etika politik yang menolak struktur kekuasaan oligarkis dan perilaku koruptif. Secara teologis, Kenosis merekonstruksi pemahaman tentang kepemimpinan sebagai tindakan pelayanan dan pengorbanan, bukan dominasi atau akumulasi privilese. Nilai-nilai ini memperkaya diskursus etika kebangsaan dengan mempertemukan dimensi spiritualitas dan tanggung jawab publik dalam satu kerangka moral yang utuh. Secara praktis, prinsip Kenosis dapat diimplementasikan dalam pembentukan karakter pemimpin publik yang berintegritas melalui pendidikan politik, kaderisasi birokrasi, dan gerakan sosial berbasis nilai pelayanan. Gereja dan lembaga pendidikan Kristen dapat berperan sebagai agen transformasi dengan menanamkan nilai kerendahan hati dan solidaritas sosial sebagai wujud pengosongan diri Kristus. Dengan demikian, Kenosis tidak hanya menjadi teori teologis, tetapi juga praksis etis yang relevan untuk membangun bangsa yang berkeadilan dan berintegritas.

### **Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian Kristologi Kenosis ini melalui pendekatan empiris yang meneliti sejauh mana nilai-nilai kenotik, seperti

kerendahan hati dan pelayanan berkorban, benar-benar diimplementasikan dalam praktik kepemimpinan politik maupun birokrasi publik di Indonesia. Studi lapangan yang melibatkan wawancara mendalam dengan pemimpin gereja, pejabat publik, dan aktivis sosial akan memberikan gambaran konkret tentang relevansi Kenosis dalam konteks sosial-politik kontemporer. Selain itu, penelitian komparatif antara etika Kenosis dan konsep etika kepemimpinan dari tradisi agama lain dapat memperkaya dialog lintas iman mengenai moralitas publik. Kajian interdisipliner yang menggabungkan teologi politik, etika publik, dan filsafat sosial juga penting untuk memperkuat fondasi teoritisnya. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana spiritualitas kenotik diterapkan dalam pendidikan karakter dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan demikian, riset berikutnya diharapkan mampu memperdalam kontribusi Kenosis sebagai paradigma etis transformatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

### Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Kristologi Kenosis dari Filipi 2:5-11 dapat berfungsi sebagai paradigma etika kebangsaan untuk menghadapi oligarki dan korupsi politik di Indonesia. Nilai-nilai kenotik, yaitu pengosongan diri, kerendahan hati, pelayanan berkorban, dan solidaritas, secara langsung menantang akar persoalan politik Indonesia yang dibentuk oleh keserakahan, akumulasi kekuasaan, dan penyalahgunaan wewenang. Anti-keserakahan menjadi kritik moral terhadap perilaku koruptif, pelayanan berkorban menawarkan alternatif etis bagi kepemimpinan oligarkis, dan solidaritas kenotik memulihkan keberpihakan pada rakyat kecil yang terpinggirkan oleh struktur politik elit. Dengan demikian, Kenosis merupakan antitesis teologis terhadap budaya politik yang eksploitatif, sekaligus landasan moral bagi reformasi politik menuju keadilan, integritas, dan kesejahteraan bersama. Penelitian selanjutnya disarankan menguji implementasi nilai-nilai kenotik dalam praktik kepemimpinan politik dan birokrasi melalui pendekatan empiris, seperti survei etika publik, studi kasus pemerintah daerah, atau wawancara dengan pemimpin gereja dan aktivis antikorupsi. Kajian komparatif antara etika Kenosis dan tradisi etika kepemimpinan agama lain juga penting untuk memperkaya pemahaman lintas iman tentang moralitas publik dalam konteks Indonesia.

### Rujukan

- Adon, M. J., Wotan, F. B., & Riyanto, E. A. (2024). Contextualizing God's Kenosis of The St. Montfort Theology in Relation to The Application of Omnibus Law in Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 22(1), 187–220. <https://doi.org/10.31291/jlka.v22i1.1041>
- Agolia, G. M. (2020). Clarifying the Task of the Church in a Secular Age. *Lumen et Vita*, 10(2), 38–51. <https://doi.org/10.6017/lv.v10i2.12597>
- Alfa, P., & Fahmi, K. (2022). Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(2), 82–85. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.43>
- Arifin, A., Nuravoy Sihotang, Ilham Septiani, Fatih Haramain, Febri Damayanti, & May Riski Anita Rahayu. (2023). CULTIVATE ANTI-CORRUPTION IN ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT IN INDONESIA. *DE'RECHTSSTAAT*, 9(1). <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i1.8071>
- Bashir, M., & Hassan, S. (2020). The Need for Ethical Leadership in Combating Corruption. *International Review of Administrative Sciences*, 86(4), 673–690. <https://doi.org/10.1177/0020852318825386>
- Bertova, A. D. (2024). Kitamori Kazoh's "Theology of the Pain of God": Main Ideas. *Voprosy Filosofii*, 2024(10), 132–142. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2024-10-132-142>

- Bevans, S. (2022). Syncretism and Christian Tradition: Race and Revelation in the Study of Religious Mixture. *International Bulletin of Mission Research*, 46(4), 595–598. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/23969393221096476>
- Bidandi, F., Williams, J. J., & Waiswa, J. (2022). An Evaluation of Predatory Governance in Uganda and Indonesia. *Journal of Sociological Research*, 13(1), 25. <https://doi.org/10.5296/jsr.v13i1.19645>
- Brodsky, A. I. (2024). Three Versions of Kenosis. On Moral and Philosophical Interpretations of Christ's Self-humiliation. *Ethical Thought*, 24(1), 5–19. <https://doi.org/10.21146/2074-4870-2024-24-1-5-19>
- Budi, K. (2024). Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1267–1274. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1101>
- Damanik, I., Rompas, A., Nadia, Z., Berenschot, W., & Warburton, E. (2025). Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 61(1), 39–60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2442417>
- Daryanto, A. (2022). Keberpihakan Terhadap Orang Miskin Sebagai Tindakan Kenosis. *Studia Philosophica et Theologica*, 22(1), 19–40. <https://doi.org/10.35312/spet.v22i1.418>
- Elyta, E., Hertanto, H., & Maryanah, T. (2022). Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1394–1406. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7247>
- Faiki, L. O. (2023). The Phenomenon of Corruption and Efforts to Combat Corruption in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(2), 381–391. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i2.2437>
- Feinberg, P. D. (1980). The Kenosis And Christology: An Exegetical-Theological Analysis Of Phil 2:6-11. *Trinity Journal*, 1(1), 21–46.
- Gule, Y. (2022). A Theological-Ethical Study of Church Against Corruption. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(2), 1910–1920. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i2.263>
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Hadiyanto, A. (2022). Pelaksanaan Dan Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Petita*, 4(2), 160–174. <https://doi.org/10.33373/pta.v4i2.4969>
- Hasan, H. (2020). Reversed Proof as an Effort to Optimize the Handling of Corruption in Indonesia. *Corruptio*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2072>
- Hasanal Bolqiah, L., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151–167. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112>
- Hayckel, E., & Chairiyah, S. Z. (2022). Abuse of Power by Government Applications on Government Policies During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 06(05), 727–731. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.6539>
- Irham, M. A. (2021). The Exclusiveness of Political Parties and Growing Corruption in Indonesia's Democracy. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 25(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v25i2.12249>
- Ismayani, Yusri, & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385–395. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.269>
- Isroani, F. (2022). Korupsi dan Degradasi Nilai Etika Pancasila. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 1(1), 19–22. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i1.534>
- Jersak, B. (2023). Biblical and Christological Foundations for Voluntary Kenosis. *The Kenarchy Journal*, 5, 1–30. <https://doi.org/10.62950/vvsu51>

- Jones-Carmack, J. (2020). Toward a Christological Model of Leadership: Understanding Ethical and Moral Leadership Through a Sacred Texture Analysis of Philippians 2:5-11. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, 17(6). <https://doi.org/10.33423/jlae.v17i6.3799>
- Josette, R. P., & Baholy, R. R. (2023). The Kenosis of Jesus Christ: Model of the Christian Life According To Philippians 2:5-11. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal*, 5(3), 217–230. <https://doi.org/10.33258/biohs.v5i3.997>
- Kleeck Jr., P. Van. (2021). Eschatological Space and Triune Kenosis: Jürgen Moltmann on the Nature of Created and Eschatological Space. *Eleutheria: John W. Rawlings School of Divinity Academic Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.70623/LVRE6082>
- Kritsak, I. (2022). Anti-Corruption Criminology in Line with The Spiritual-Value Paradigm: Ethical and Educational Section. *New Ukrainian Law*, 4, 83–94. <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.4.13>
- Layyina, T. H., Umar, M. R., Rahmadhani, M. A., Cindy, & Ridwan. (2024). Analysis of The Political Oligarchy DPR of Indonesia During The Jokowi Administration (2019-2024). *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(6), 717–724. <https://doi.org/10.35877/soshum3416>
- Le Poidevin, R. (2013). Kenosis, Necessity and Incarnation. *The Heythrop Journal*, 54(2), 214–227. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2265.2012.00796.x>
- Maboloc, C. R. (2020). Fighting the Oligarchs: President Duterte and the Argument Against Elite Rule – a Perspective From the Academe. *Malim: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara (Sea Journal of General Studies)*, 21(1), 34–46. <https://doi.org/10.17576/malim-2020-2101-03>
- Magree, M. C. (2024). The Interpretation of Kenosis from Origen to Cyril of Alexandria: Dimensions of Self-Emptying in the Reception of Philippians 2:7. Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198896661.001.0001>
- Marwing, A. (2021). Indonesian Political Kleptocracy and Oligarchy: A Critical Review from the Perspective of Islamic Law. *Justicia Islamica*, 18(1), 79–96. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2352>
- Mdingi, H. (2020). Who, Being in the Form of God, did not Consider it Robbery to be Equal with God: Kenosis of Leadership. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 76(2), 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i2.5844>
- Meyer-Sahling, J. H., & Mikkelsen, K. S. (2022). Codes of Ethics, Disciplinary Codes, and the Effectiveness of Anti-Corruption Frameworks: Evidence from a Survey of Civil Servants in Poland. *Review of Public Personnel Administration*, 42(1), 142–164. <https://doi.org/10.1177/0734371X20949420>
- Meyer, K. Z., Luiz, J. M., & Fedderke, J. W. (2025). Corruption Dynamics: Integrating Structure, Agency and Institutional Logics Across Contexts. *International Journal of Management Reviews*, 1–20. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12403>
- Molina, A. (2025). Hegel's Political Theology of Kenosis: From the Death of God to the Hegelian Monarch. *Sophia*, 64(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s11841-024-01022-0>
- Mostert, C. (2013). Moltmann's Crucified God. *Journal of Reformed Theology*, 7(2), 160–180. <https://doi.org/10.1163/15697312-12341293>
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54>
- Mukti, H. H., & Rodiyah, R. (2020). Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy? *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 531–538. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.38090>

- Musa, A. M. (2022). The Shift of Indonesian Political Culture from Moral Legitimacy to Capital Legitimacy. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1767–1772. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.202>
- Muzaki, H. (2021). Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction*, 4(4), 1431. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28455>
- Neo, S., Grimmelhuijsen, S., & Tummers, L. (2023). Core Values for Ideal Civil Servants: Service-oriented, Responsive and Dedicated. *Public Administration Review*, 83(4), 838–862. <https://doi.org/10.1111/puar.13583>
- Nggebu, S. (2022). Pencegahan Korupsi Menurut Iman Kristen. *Jurnal Teologi Injili*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.55626/jti.v2i1.14>
- Novianto, A., & Wulansari, A. D. (2023). Responding to Elite Consolidation: the Anti-Cement-Factory Movement Resisting Oligarchy in an Indonesian Local Election. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(3), 298–310. <https://doi.org/10.22146/jsp.50591>
- Ottuh, J. A. (2020). The Concept of *Κένωσις* in Philippians 2:6–7 and its Contextual Application in Africa. *Verbum et Ecclesia*, 41(1), 1–13. <https://doi.org/10.4102/ve.v41i1.2081>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Panjaitan, F. (2020). Kepemimpinan Yesus Kristus sebagai Model Dasar Kepemimpinan Kristen Berdasarkan Matius 20:20-28. *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, 1(2). <https://doi.org/10.34307/kinaa.v1i2.14>
- Phillips, J. (2025). The Divine Idea of the Self and Contemporary Culture. *Religions*, 16(5), 619. <https://doi.org/10.3390/rel16050619>
- Purwaningsih, T., & Widodo, B. E. C. (2020). The Interplay of Incumbency, Political Dynasty and Corruption in Indonesia: Are Political Dynasties the Cause of Corruption in Indonesia? *UNISCI Journal*, 18(53), 157–176. <https://doi.org/10.31439/UNISCI-89>
- Rahadian, S., & Fallderama, F. (2020). Sikap Kritis terhadap Kekuasaan dalam Tradisi Calvinist: Sebuah Kajian Historis-Teologis Tentang Kekritisan Gereja terhadap Pemerintah untuk Mewujudkan Regnum Christi. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 7(2), 219–244. <https://doi.org/10.33550/sd.v7i2.173>
- Ranggong, A. M. A., Abidin, Z., & Uksan, A. (2023). Politik Uang dan Risiko Korupsi yang Mengancam Pertahanan Nirmiliter. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 145–149. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4231>
- Rea, A. M. (2022). Korupsi: Absennya Keadilan dan Cinta (Studi terhadap Deus Caritas Est art. 28). *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 6(2), 18. <https://doi.org/10.53949/ar.v6i2.137>
- Ryliškýtė, L. (2024). Kenotic Solidarity in Discernment. *Religions*, 15(12), 1453. <https://doi.org/10.3390/rel15121453>
- Salahudin, Sihidi, I. T., Roziqin, A., Cahyani, T. D., Karinda, K., Firdaus, M., & Baharuddin, T. (2025). Research Theme Mapping and Future Directions on Corruption and Religion: a Bibliometric Analysis. *Frontiers in Sociology*, 10, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1502700>
- Sofhian, S. (2021). Jalan Panjang Penanganan Korupsi di Indonesia. *Jentre*, 2(1), 17–25. <https://doi.org/10.38075/jen.v2i1.24>
- Speckman, M. (2022). Destroying the City, Burning the fields: Towards a New Testament Concept and Definition of Corruption. *Pharos Journal of Theology*, 103(2), 1–20. <https://doi.org/10.46222/PHAROSJOT.103.2041>
- Suprihanto, E., Utama, Y. J., & Cahyaningtyas, I. (2023). Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 204–219. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.204-219>

- Surbakti, N. (2022). Yesus Sang Imanuel sebagai Pembebas: Pencarian Gagasan Pembebasan dalam Injil Matius dan Implikasinya bagi Gereja di Indonesia. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(2), 13–26. <https://doi.org/10.46974/ms.v2i2.43>
- Suteki. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *Crepido*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170>
- Sutono, Y., Arifianto, Y. A., & Loveano, N. Y. (2023). Deskriptif Kepemimpinan Kristen dalam Perspektif Filipi 2: 3-8. *Jurnal Ap-Kain*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.52879/jak.v1i1.58>
- Tambunan, D. (2023). The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2), 637–653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Tumbol, J. B., & Sukri, A. (2022). Korupsi dari Perspektif Etika Kristen: Aspek Potensi Korupsi dan Upaya Gereja Meminimalisir Perilaku Korupsi. *Jurnal Salvation*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.56175/salvation.v3i1.44>
- Uling, M., & Candrawati. (2025). Library Research dalam Penelitian Teologi Sistematis: Reafirmasi. *Jurnal Luxnos*, 11(1), 323–336. <https://doi.org/10.47304/dhkwwf29>
- Valsangiacomo, C. (2024). Fighting Political Corruption with the Citizens. *Res Publica*, 30(4), 873–882. <https://doi.org/10.1007/s11158-024-09659-x>
- Vergara, C. (2020). Systemic Corruption: Constitutional Ideas for an Anti-Oligarchic Republic. In *Jurisprudence* (Vol. 13, Issue 1). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691208732>
- Vergara, C. (2021). Corruption as Systemic Political Decay. *Philosophy & Social Criticism*, 47(3), 322–346. <https://doi.org/10.1177/0191453719868265>
- Walui, D. A. E. D. P., & Novalina, M. (2024). Pemaknaan Kenosis sebagai Motivasi untuk Menghidupi Kekristenan yang Otentik di Era Postmodern. *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 5(2), 252–267. <https://doi.org/10.46408/vxd.v5i2.374>
- Weißmüller, K. S., & Zuber, A. (2023). Understanding the Micro-Foundations of Administrative Corruption in the Public Sector: Findings from a Systematic Literature Review. *Public Administration Review*, 83(6), 1704–1726. <https://doi.org/10.1111/puar.13699>
- Yuflih, M. (2022). Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam Kaitannya dengan Korupsi di Instansi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 826–840. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.328>